

Capaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Pagu Anggaran 2022
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Urusan pemerintahan	Organisasi perangkat daerah pelaksana	Kebijakan	Uraian program/kegiatan		Target (%)	% Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	tinjutan rekomendasi DPRD	
							(%)				
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	42,52	%			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	13,66	%	Narasumber dari OPD dinkes sehingga realisasi honor berkurang 50%, kegiatan di P.APBD tidak terbayarkan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100,00	%	Tidak ada		
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	60,73	%	Narasumber dari OPD dinkes sehingga realisasi honor berkurang 50%	Optimalisasi penyerapan anggaran	
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	97,04	%	Tidak ada		

5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 00	56,60	%	Narasumber dari OPD dinkes sehingga realisasi honor berkurang 50%	Optimalisasi penyerapan anggaran	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 00	98,98	%			
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 00	98,98	%	Tidak ada		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 00	-	%			
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 00	-	%	tidak tersedia anggaran		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 00	1,47	%			
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 00	1,47	%	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan OPD	optimalisasi penganggaran	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 00	69,23	%			
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 00	65,61	%	belanja modal di realisasikan pembayarannya di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 00	49,79	%	perubahan harga barang	optimalisasi penganggaran	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 00	92,81	%	Tidak ada		

12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 00	78,65	%	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan OPD	optimalisasi penganggaran	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 00	62,94	%	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan OPD	optimalisasi penganggaran	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 00	58,26	%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 00	85,66	%			
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 00	83,47	%	penyesuaian harga		
16	Pengadaan Mebel	1 00	96,48	%	Tidak ada		
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 00	83,08	%	penyesuaian harga		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 00	75,98	%			
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 00	76,67	%	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan OPD		
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 00	67,00	%	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan OPD		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 00	80,62	%	penyerapan anggaran sesuai kebutuhan OPD		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 00	32,99	%			
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 00	45,56	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
22	Pemeliharaan Mebel	1 00	-	%	tidak ada anggaran		
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 00	16,06	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 00	37,82	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 00	-	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 00	53,27	%			

26	Pengembangan Puskesmas	1 00	92,71	%	Tidak ada		
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 00	51,89	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
28	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 00	83,05	%	Tidak ada		
29	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 00	18,45	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
30	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1 00	32,94	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
31	Pengadaan Obat, Vaksin	1 00	68,60	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
32	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 00	46,45	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023	penambahan anggaran di DPA 2023	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 00	60,75	%			
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 00	39,69	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 00	4,25	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi	Optimalisasi penyerapan	

					kegiatan	anggaran	
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 00	9,06	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 00	16,95	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 00	-	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 00	61,81	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 00	-	%	Tidak tersedia anggaran		
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 00	80,00	%	Tidak ada		
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 00	50,00	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 00	-	%	Tidak tersedia anggaran		
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 00	47,42	%	pembayaran direalisasikan di TA 2023		
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	1 00	96,66	%	Tidak ada		

	Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 00	84,94	%	Tidak ada		
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 00	-	%	Tidak tersedia anggaran		
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 00	56,49	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
48	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 00	-	%	Tidak Tersedia anggaran		
49	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 00	3,84	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 00	-	%	Tidak tersedia anggaran		
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1 00	15,71	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
52	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 00	-	%	Tidak tersedia anggaran		
53	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 00	69,08	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	

54	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 00	63,57	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
55	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 00	95,02	%	Tidak ada		
56	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1 00	91,43	%	Tidak ada		
57	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 00	7,08	%	Anggaran dari dana kapitasi puskesmas	Optimalisasi penyerapan anggaran	
58	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 00	23,29	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
59	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 00	-	%	Penilaian Akreditasi Puskesmas ditunda		
60	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 00	55,66	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan	Optimalisasi penyerapan anggaran	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 00	9,05	%			
61	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 00	63,08	%	Narasumber dari OPD dinkes sehingga realisasi honor berkurang 50%, kegiatan di P.APBD tidak terbayarkan		
62	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 00	6,18	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama	Optimalisasi penyerapan	

					turun dan adanya revisi kegiatan	anggaran	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 00	6,13	%			
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1 00	-	%	Tidak tersedia anggaran		
64	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 00	36,91	%			
65	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 00	-	%	jadwal penilaian BLUD Puskesmas di revisi		
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1 00					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	1 00	92,84	%			

	Daerah Kabupaten/Kota						
66	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 00	92,84	%	tidak ada		
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 00	50,60	%			
67	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 00	50,60	%	sesuai kebutuhan OPD		
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 00	41,98	%			
68	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 00	41,98	%	Rendah realisasi karena Juknis DAK nonfisik lama turun dan adanya revisi kegiatan		
		1 00	78,03	%			

Binjai,
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI**

dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199903 1 003